

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU (PKT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA

Fajri Defri Sya'ban

NPP. 31.0332

Asdaf Pendaftaran Provinsi DKI Jakarta

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email : [fajridefrisyaban111@gmail.com](mailto:fajridefrisyaban111@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si.

## ABSTRACT

**Background/Problem (GAP):** *The Integrated Entrepreneurship Development Program (PKT) is a program aimed at enhancing entrepreneurial skills through various stages such as training, entrepreneur mentoring, licensing, marketing, financial reporting, and capital facilities. The Integrated Entrepreneurship Development Program has been regulated in the Governor of DKI Jakarta Regulation Number 2 of 2020. The Integrated Entrepreneurship Development Program is a program conducted to develop entrepreneurial skills and self-reliance and to address unemployment and poverty levels. In implementing the PKT Program policy, the author encountered several problems in its implementation, where the program's targets had been achieved but the objectives of the PKT Program policy had not been fully achieved. Additionally, the number of PKT Program mentors was not proportionate to the number of PKT Program participants. Furthermore, PKT Program participants had not yet received the expected facilities, namely the main capital in the form of cash assistance. Moreover, many people, especially the poor, were unaware of the existence of the PKT Program.*

**Purpose:** *The aim of this study is to determine how the implementation of the PKT Program addresses poverty in North Jakarta Administrative City and to examine the obstacles and support in its implementation.*

**Methods:** *The research method used is descriptive qualitative research. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The focus of the research is to use the theory of Van Meter and Van Horn, namely Policy Standards and Targets, Resources, Implementer Characteristics, Implementer Disposition Attitudes, Communication among Implementing Organizations, as well as Social, Economic, and Political Environments.*

**Results:** *Based on the research results, significant problems and obstacles were found in the implementation of the PKT Program policy, namely the limitation of society in using technology to register for the PKT Program through the website and the low discipline of the community in attending PKT Program training.*

**Conclusion:** *From the research activities conducted by the author, guided by existing theories, it is concluded that the implementation of the PKT Program in North Jakarta Administrative City is not yet optimal. There are still several problems such as the unachieved policy objectives, inadequate number of PKT Program mentors, unmet cash assistance*

*capital facilities, and many poor people who are unaware of the existence of the PKT Program.*  
**Keywords:** *Poverty, PKT Policy Implementation, Poor Population Reduce*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) ialah program peningkatan kemampuan berusaha melalui berbagai tahapan seperti pelatihan, pendampingan wirausaha, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan fasilitas permodalan. Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020. Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu merupakan sebuah program yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan keterampilan dan kemandirian berusaha serta menanggulangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program PKT penulis memperoleh beberapa masalah di dalam pelaksanaannya dimana sasaran daripada program ini sudah tercapai namun tujuan dari adanya kebijakan Program PKT belum sepenuhnya tercapai kemudian juga dengan jumlah pendamping Program PKT tidak sebanding dengan jumlah peserta Program PKT selain itu para peserta Program PKT belum mendapatkan fasilitas yang diharapkan yakni modal utama berupa bantuan uang tunai. Kemudian masih banyaknya masyarakat terutama masyarakat miskin yang belum mengetahui adanya Program PKT. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program PKT dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara serta dilihat dari hambatan dan dukungan dalam pelaksanaannya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus dalam penelitian yaitu menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Pelaksana, Sikap Disposisi Para Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi Pelaksana, serta Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan Program PKT ditemukan beberapa masalah yang cukup signifikan serta hambatan dalam pelaksanaan Program PKT yakni adanya keterbatasan masyarakat dalam penggunaan teknologi dalam melaksanakan pendaftaran Program PKT melalui *website* serta masih rendahnya disiplin masyarakat dalam mengikuti pelatihan Program PKT. **Kesimpulan:** Dari kegiatan penelitian yang dilakukan penulis dengan berpedoman pada teori yang ada, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program PKT di Kota Administrasi Jakarta Utara belum optimal masih terdapat beberapa permasalahan seperti belum tercapainya tujuan kebijakan, tidak memadainya jumlah pendamping Program PKT, belum terpenuhinya fasilitas modal berupa bantuan uang tunai dan masih banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui adanya Program PKT.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Implementasi Kebijakan PKT, Penduduk Miskin Berkurang

## I. PENDAHULUAN

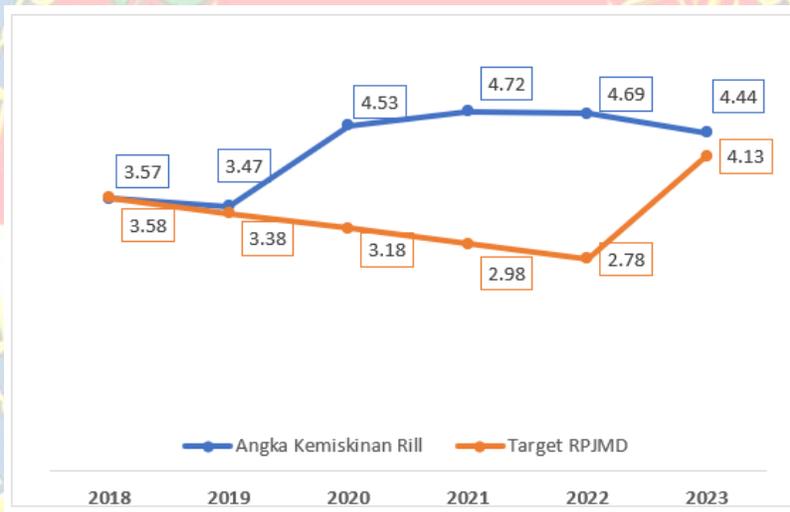
### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana ketidakberdayaan dilihat dari aspek ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan yang diukur berdasarkan pengeluaran (BPS, 2023). Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu perhatian

global yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* diantara 17 tujuan lainnya. Penanggulangan kemiskinan merupakan sebuah komitmen di dalam SDGs untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk yang mana ditargetkan pada tahun 2030 dapat mengurangi angka kemiskinan setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari segala usia di dunia (UNDP, 2023).

Kemiskinan telah menjadi permasalahan di setiap negara berkembang tak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data BPS (2023), presentase kemiskinan di Indonesia per-bulan Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi. Kemiskinan juga terjadi di setiap daerah di Indonesia terutama di kota yang jumlah penduduknya banyak salah satunya terjadi di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta). BPS Jakarta (2023) menyebutkan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mencapai 10,67 juta jiwa.

Padatnya jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan berbagai permasalahan sosial diantaranya kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus ditangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fenomena kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan target dan realisasi penurunan angka kemiskinan tahun 2018–2023 sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1**  
**Target dan Realisasi Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2018-2022**

Sumber : Bappeda DKI Jakarta, (2023)

Gambar 1.1 menunjukkan persentase kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19* yang mana terjadi peningkatan pada tahun 2021 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 serta tahun 2023. Namun apabila dilihat berdasarkan grafik persentase kemiskinan tersebut tidak sesuai dengan target penurunan kemiskinan yang ada di dalam dokumen RPJMD 2017-2022 dan RPD 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2019 sebelum terjadi pandemi *Covid-19* persentase kemiskinan ditargetkan turun menjadi 3,38%, namun realisasi persentase kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 3,47%. Begitu pula pada tahun 2022 persentase kemiskinan ditargetkan turun menjadi 2,78%, namun realisasi persentase kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 4,69%. Pada

tahun 2023 meskipun target persentase meningkat menjadi 4,13% namun target tersebut tetap tidak tercapai yang mana realisasi persentase kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 4,44%.

Jakarta Utara menjadi salah satu kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah penduduk miskin di Jakarta Utara dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 – 2022**

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kep Seribu	2,93	3,63	3,86	3,67	3,47
2	Jakarta Selatan	61,77	78,09	81,50	81,11	71,90
3	Jakarta Timur	91,51	122,73	125,37	126,63	124,22
4	Jakarta Pusat	34,13	41,92	45,10	44,72	42,78
5	Jakarta Barat	84,06	110,90	113,37	112,18	109,49
6	Jakarta Utara	91,15	123,59	132,73	133,73	125,98

Sumber : BPS Jakarta, (2023)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin di Jakarta Utara menempati urutan pertama di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berjumlah 125.980 orang pada tahun 2023. Dari tahun 2019 - 2023 jumlah penduduk miskin di Jakarta Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 terdapat 91.150 orang penduduk miskin yang mana terjadi kenaikan sebanyak 32.440 orang pada tahun 2020 menjadi sebanyak 123.590 orang, kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebanyak 9.140 orang menjadi 132.730 orang. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebanyak 1.000 orang menjadi 133.730 orang penduduk miskin. Pada tahun 2023 terjadi penurunan sebanyak 7.750 orang menjadi 125.980 orang.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang merupakan salah satu program dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kota Administrasi Jakarta Utara menghadapi berbagai tantangan yang ditemukan peneliti. Kurangnya jumlah pegawai yakni pendamping Program PKT yang tidak sebanding dengan jumlah pendamping Program PKT yang ada. Selain itu, para peserta Program PKT belum mendapatkan fasilitas yang diharapkan dalam Program PKT yakni modal utama berupa uang walaupun mereka telah diberikan berbagai fasilitas dalam Program PKT. Kemudian walaupun sudah dilakukan sosialisasi tetapi masih banyak juga masyarakat terutama masyarakat miskin yang belum mengetahui adanya Program PKT. Masih adanya mental menerima daripada berusaha yang ada di masyarakat terutama masyarakat miskin juga menjadi tantang tersendiri, kebanyakan dari mereka hanya ingin bantuan langsung berupa bantuan langsung tunai ataupun bantuan sosial yang diberikan pemerintah sehingga bagi masyarakat miskin yang mengikuti Program PKT ini banyak yang bermalas-malasan dan pada akhirnya tidak mengikuti program ini dengan serius.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian sebelumnya, baik dalam konteks *Collaborative Governance*, Evaluasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan maupun Efektivitas pada pelaksanaan Program PKT. Penelitian pertama dilakukan oleh Handoko Dwi Susantyo, Ermaya Suradinata, Megandaru Kawuryan pada tahun 2022 dalam bentuk jurnal ilmiah, dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan (Susantyo dkk., 2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu telah melibatkan *stake holders* pemerintah, masyarakat dan swasta serta telah berjalan baik tetapi masih belum optimal diantaranya dalam tahapan permodalan melalui kredit usaha rakyat belum didapati pemohon yang merupakan peserta program pengembangan kewirausahaan terpadu ini sampai ke dalam tahapan P7 / permodalan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Satria Rahmadi pada tahun 2019 dalam bentuk jurnal ilmiah, dengan judul Implementasi program pengembangan kewirausahaan terpadu di Kecamatan Duren Sawit (Rahmadi, 2019). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang terlibat untuk melihat kinerja implementor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi menjadi terlihat bagaimana dari setiap tahapan proses program mulai dari pendaftaran hingga permodalan melibatkan keempat faktor dari teori tersebut, sehingga mewujudkan apa yang dituju dalam dasar program ini yang mengatakan terwujudnya iklim kolaboratif antar pemerintah, dunia wirausaha, dan masyarakat sehingga nanti pada kurun waktu program ini jalankan dapat menciptakan target makro minimal 200.000 wirausaha baru dari hasil binaan di seluruh kecamatan yang berada di DKI Jakarta.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nabila Cahya Pramita pada tahun 2023 dalam bentuk skripsi, dengan judul Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat (Pramita, 2023). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor penghambat dalam penyelenggaraan program, terutama dalam tahapan pelatihan, pendampingan, permodalan, dan pelaporan keuangan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Vicky Nanda Tiara pada tahun 2022 dalam bentuk skripsi, dengan judul Analisis Efektivitas Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (*Jakpreneur*) Bidang Agribisnis di Kecamatan Cakung (Tiara, 2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan program PKT bidang agribisnis pada Sudin KPKP Kecamatan Cakung telah berjalan efektif. Secara parsial didapati tingkat efektivitas pada tahapan pelaksanaan kegiatan pendaftaran sangat efektif, pada tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan dikategorikan efektif, pada tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan dikategorikan sangat efektif, pada tahapan pelaksanaan kegiatan pemasaran dikategorikan efektif, pada tahapan pelaksanaan kegiatan perizinan dikategorikan cukup efektif, pada tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan dikategorikan kurang efektif dan pada tahapan pelaksanaan kegiatan fasilitas permodalan dikategorikan sangat tidak efektif.

Penelitian kelima dilakukan oleh Dinda Tri Wulandari pada tahun 2019 dalam bentuk skripsi, dengan judul *Collaborative Governance* dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas KUKMP di Jakarta Barat Tahun 2017 – 2018 (Wulandari, 2019). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program PKT ini berjalan tetapi masih ada kekurangan terhadap komitmen yang berakibat kepada eksistensi program selanjutnya komunikasi yang masih kurang terjalin sehingga berdampak pada satu kesatuan

database serta kurang tegasnya kerja sama sehingga salah satu pihak hanya fokus menjalani programnya sendiri.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan dari penelitian sebelumnya, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni bagaimana Implementasi Pelaksanaan Program PKT dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, selain itu pengukuran indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn (1975) dengan membagi keberhasilan implementasi menjadi enam variabel yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap disposisi para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program PKT dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara serta dilihat dari hambatan dan dukungan dalam pelaksanaannya.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, desain dari penelitian ini dipilih sebab lebih tepat dalam mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Program PKT dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Menurut Creswell (2015), pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk memberikan pengetahuan baru tentang sesuatu peristiwa. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk memahami makna persoalan sosial atau kemanusiaan dari sejumlah individu ataupun kelompok. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai realita empirik dari sebuah permasalahan secara mendalam. Oleh karena itu pendekatan kualitatif pada penelitian ini mencocokkan realita empirik dengan teori yang ada melalui metode deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif. Menurut Ibrahim (2015), penelitian deskriptif adalah penulisan yang menggambarkan keadaan sebenarnya perihal objek yang diteliti menurut peristiwa realita saat penelitian.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan guna untuk menganalisis data yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian naratif mengenai gambaran maupun situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan dengan menekankan pada proses dan makna dari masalah. Kajian ini secara sistematis mengintegrasikan, mengolah dan menganalisis terkait dengan permasalahan yang ada dilapangan, dan kemudian dapat ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Program PKT dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data primer, penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Suku Dinas PPKUKM Jakarta Utara, Kepala Sub Bagian UKM Suku Dinas PPKUKM Jakarta Utara, Kepala Satuan Pelaksana Dinas PPKUKM di Kecamatan Kelapa Gading, Kepala Satuan Pelaksana Dinas PPKUKM di Kecamatan Koja, Kepala Satuan Pelaksana Dinas PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok dan Masyarakat Peserta Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara menggunakan pendapat dari Van Meter dan Van Horn (1975) dengan membagi keberhasilan implementasi menjadi enam variabel yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap disposisi para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kota Administrasi Jakarta Utara**

##### **3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan**

Program PKT sendiri mengacu pada Pasal 2 Peraturan Gubernur No.2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu memiliki tujuan yakni untuk mengurangi angka kemiskinan dengan membuka peluang berwirausaha. Sasaran daripada program ini sudah tercapai namun tujuan dari adanya kebijakan Program PKT untuk menanggulangi kemiskinan terutama di Kota Administrasi Jakarta Utara ini belum sepenuhnya tercapai disebabkan masih meningkatnya angka kemiskinan di setiap tahunnya. Selain itu Program PKT ini belum sepenuhnya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat miskin dikarenakan banyak dari masyarakat miskin yang telah mengikuti Program PKT ini harus berhenti menjalankan usahanya disebabkan kurangnya modal untuk menjalankan usahanya.

##### **3.2 Sumber Daya**

Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini yakni sumber daya manusia/staff pelaksana, anggaran dan adanya fasilitas yang dapat menopang keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan Program PKT dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Dari segi sumber daya manusia/staff pelaksana jumlah pegawai dalam hal ini pendamping masih kurang memadai diakibatkan jumlah peserta Program PKT yang tidak sebanding dengan jumlah pendamping Program PKT yang ada. Kemudian dari segi anggaran sumber daya kebijakan dalam hal ini anggaran telah dialokasikan secara maksimal melalui penyerapan maksimal anggaran yang mencapai 98,85% untuk anggaran Program PKT sendiri serta mencapai 95,69% secara keseluruhan anggaran Sudin PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Utara. Sedangkan dari segi fasilitas Program PKT belum mendapatkan fasilitas yang diharapkan dalam Program PKT yakni modal utama berupa uang walaupun mereka telah diberikan berbagai fasilitas dalam Program PKT ini.

##### **3.3 Karakteristik Pelaksana**

Karakteristik agen pelaksana yakni sebuah sikap yang ditunjukkan oleh implementor kebijakan. Seorang implementor kebijakan harus memiliki kompetensi untuk menjalankan sebuah kebijakan sesuai dengan yang disyaratkan. Dari seluruh jumlah pegawai yang ada di Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Utara telah memiliki kompetensi pegawai yang baik.

Selanjutnya setelah memiliki kompetensi yang baik seorang implementor perlu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Dari seluruh SOP yang ada semuanya telah berjalan dengan baik serta implementor kebijakan sudah memiliki kompetensi yang baik terutama dalam menjalankan SOP yang ada sehingga Program PKT dapat berjalan dengan baik.

### **3.4 Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana**

Para individu atau implementor kebijakan harus memahami apa yang menjadi standar tujuan dari sebuah kebijakan agar kebijakan yang ada dapat berjalan dengan efektif. Dalam implementasi kebijakan yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian tujuan adalah komunikasi. Apa yang para pembuat keputusan kerjakan harus sudah diketahui agar implementasi dapat berjalan efektif dan jika komunikasi dapat berjalan lancar maka para pembuat keputusan sudah memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan. Di sisi lain, kebijakan harus dikomunikasikan secara akurat, tepat dan konsisten. Para pembuat keputusan dan implementor dapat semakin konsisten dalam menjalankan kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat apabila terjalin komunikasi yang baik.

Pelaksanaan sosialisasi kegiatan dari pada Program PKT dalam menanggulangi kemiskinan telah dilakukan sebagai bentuk komunikasi kepada masyarakat dengan menyebar berupa brosur di tiap kelurahan, melalui perkumpulan masyarakat seperti perkumpulan Tim Penggerak PKK dan media sosial. Namun walaupun sudah dilakukan sosialisasi tetapi masih banyak juga masyarakat terutama masyarakat miskin yang belum mengetahui adanya Program PKT. Selain itu koordinasi telah dilaksanakan oleh pihak Suku Dinas PPKUKM Jakarta Utara dengan komponen pelaksana Program PKT lainnya baik dengan satuan pelaksana di kecamatan, pendamping Program PKT maupun dengan masyarakat peserta Program PKT.

### **3.5 Sikap Disposisi Para Pelaksana**

Menurut Van Metter Van Horn sebuah keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan. Van Meter Van Horn menjelaskan disposisi merupakan pengetahuan dan pemahaman implementor, arah respon implementor apakah menerima, netral atau menolak kebijakan serta intensitas terhadap kebijakan merupakan elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk menjalankan sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian dari segi arah respon implementor, respon implementor di lingkungan Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Utara mendukung Program PKT dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara yang mana program ini adalah program yang dibuat oleh pemerintah sehingga harus selalu di dukung oleh setiap pegawai. Kemudian dari segi pemahaman implementor tentang kebijakan yang dilaksanakan para implementor kebijakan Program PKT dinilai telah memahami tugas dan wewenangnya masing-masing. Para implementor juga telah memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan tersebut. Implementor juga terus berkoordinasi dengan struktur di atasnya tentang pelaksanaan program serta telah bekerja sesuai dengan pedoman.

### **3.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Menurut Van Meter Van Horn dalam implementasi kebijakan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi faktor penting disebabkan faktor tersebut dapat mendorong pelaksanaan dan memengaruhi badan pelaksana. Dilihat dari lingkungan ekonomi pada Program PKT ini memberi dampak positif bagi para wirausaha naik kelas yang mana memang sebelumnya sudah mempunyai usaha adanya kenaikan keuntungan setelah mengikuti Program PKT namun bagi wirausaha pemula yakni dalam hal ini masyarakat miskin yang mendaftar Program PKT masih kesulitan karena kebutuhan utama mereka dalam hal ini adalah bantuan modal.

Jika dilihat dari segi lingkungan sosial, Program PKT masih adanya mental menerima daripada berusaha yang ada di masyarakat terutama masyarakat miskin, sehingga kebanyakan dari mereka hanya ingin bantuan langsung berupa bantuan langsung tunai ataupun bantuan sosial yang

diberikan pemerintah sehingga bagi masyarakat miskin yang mengikuti Program PKT ini banyak yang bermalas-malasan dan pada akhirnya tidak mengikuti program ini dengan serius.

Kemudian dilihat dari segi politik Program PKT ini juga telah mendapat dukungan dari segi kepartaian yang mana terlihat bahwa adanya partisipasi partai dalam bentuk mengundang bazar ke stan kepartaian apabila terdapat acara di gedung DPRD sehingga adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif di dalam Program PKT.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara**

Faktor pendukungnya adalah 1) Adanya fasilitas teknologi berupa *website* yang memudahkan masyarakat untuk mendaftar Program PKT serta pemanfaatan teknologi *Qris* dalam hal transaksi keuangan. 2) Adanya sistem *e-Order* dalam pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan. 3) Adanya pelatihan yang tidak hanya diselenggarakan *offline* tetapi juga *online*. Selanjutnya faktor penghambatnya adalah 1) Adanya keterbatasan masyarakat dalam penggunaan teknologi. 2) Masih rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam mengikuti pelatihan yang ada di dalam Program PKT.

#### **3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam pelaksanaan program ini terdapat permasalahan/hambatan implementasi kebijakan ini adalah para peserta Program PKT belum mendapatkan fasilitas yang diharapkan dalam Program PKT yakni modal utama berupa uang walaupun mereka telah diberikan berbagai fasilitas dalam Program PKT selain itu jumlah pegawai yakni pendamping Program PKT yang tidak sebanding dengan jumlah pendamping Program PKT yang ada. Kemudian masih rendahnya disiplin masyarakat dalam mengikuti pelatihan yang ada. Dengan adanya hambatan ini sekiranya agar peserta Program PKT diberikan bantuan permodalan berupa bantuan uang tunai terutama kepada masyarakat miskin yang terus hadir mengikuti rangkaian pelatihan, sesuai kebijakan yang ditetapkan dan sekiranya agar jumlah pendamping Program PKT yang ada di kecamatan jumlahnya ditambahkan agar peserta Program PKT dapat terlayani dengan baik.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih terdapat hambatan di dalam pelaksanaan Program PKT, tetapi terkait dengan sasaran daripada Program PKT sudah tercapai dan SOP yang ada dengan kompetensi implementor kebijakan sudah berjalan dengan baik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa terkait dengan Pelaksanaan Program PKT dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu pelaksanaan penelitian

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih diantara Lima Pendekatan Edisi 3*. Pustaka Pelajar.
- Ibrahim. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Alfabeta
- Van Meter, V. H. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. London: Sage Publications, Inc.
- Pramita, Nabila Cahya. (2023). *Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat*. (<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/13450/>)
- Rahmadi, S. (2019). *Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Duren Sawit*. (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/31433/25615>)
- Susantyo, Handoko Dwi, Ermaya Suradinata, Megandaru Kawuryan. (2022). *Collaborative Governance dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan*. (<https://doi.org/10.53968/ja.v2i1.56>)
- Tiara, Vicky Nanda. (2022). *Analisis Efektivitas Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jakpreneur) Bidang Agribisnis di Kecamatan Cakung*. (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68605>)
- Wulandari, Dinda Tri. (2019). *Collaborative Governance dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas KUKMP di Jakarta Barat tahun 2017-2018*. (<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/171332/>)
- Badan Pusat Statistik Nasional. (2023). *Kemiskinan dan Ketimpangan*.
- Badan Pusat Statistik Jakarta. (2022). *Jumlah Penduduk DKI Jakarta*.
- Badan Pusat Statistik Jakarta. (2022). *Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta*.
- Bappeda Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022*.
- Bappeda Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026*.
- UNDP. (2023). *Sustainable Development Goals United Nations Development Programme*.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.